

ABSTRAK

Sarah Irawan (01051200121)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PINJAMAN AKIBAT PANDEMI DALAM COVID-19

(xi + 85 hal)

Pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 membuat pemerintah memberlakukan tindakan social distancing, Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), lockdown, dan karantina untuk mengurangi penyebaran Covid-19 semakin meluas, tetapi tindakan yang dilakukan pemerintah membawa dampak pada perekonomian negara serta masyarakat. Khususnya masyarakat yang melakukan pinjaman terhadap bank mengalami kesulitan untuk menjalani usahanya karena adanya pandemi, yang dimana menyebabkan adanya pihak yang gagal untuk memenuhi kewajibannya dikarenakan terdampak dari pandemi Covid-19. Sehingga debitur mengajukan keringanan memenuhi kewajiban dalam pembayaran pinjaman untuk menghindari adanya perbuatan wanprestasi. Dalam hal ini, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang terdampak dari pandemi Covid-19, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif yaitu menggunakan studi kepustakaan yang bersumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat yang terdampak dari pandemi Covid-19 terutama pihak yang melakukan pinjaman kredit kepada pihak bank dalam bentuk peraturan hukum; serta pihak bank memberikan bantuan utama berupa restrukturisasi kredit bagi pihak debitur yang dinilai dapat bangkit kembali dengan bantuan yang diberikan, atau memberikan keringanan dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, juga adanya bantuan yang diberikan berupa *rescheduling*, *reconditioning* kredit. Sedangkan untuk pembuktian tidak diperlukan jika memang tidak adanya pihak yang menyangkal, karena pandemi Covid-19 telah diketahui secara umum.

Referensi : 52 (1987-2023)

Kata kunci : Debitur, Pandemi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Sarah Irawan (01051200121)

LEGAL PROTECTION AGAINST CUSTOMERS WHO ARE UNABLE TO MEET LOAN PAYMENT OBLIGATIONS DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC

(xi + 85 pages)

At the beginning of 2020, the Covid-19 pandemic caused the government to implement social distancing measures, Large-Scale Social Restrictions (PSBB), lockdowns and quarantines to reduce the increasingly widespread spread of Covid-19, but the actions taken by the government had an impact on the country's economy and society. In particular, people who take out loans from banks are having difficulty running their businesses due to the pandemic, which has resulted in parties failing to fulfill their obligations due to the impact of the Covid-19 pandemic. So, the debtor applies for relief from fulfilling obligations in loan payments to avoid acts of default. In this case, the government also provides legal protection for parties affected by the Covid-19 pandemic, namely through Law Number 2 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic. The type of research used in this thesis is a normative method, namely using literature study from secondary data sources. The research results show that there is legal protection provided by the government to protect people affected by the Covid-19 pandemic, especially those who make credit loans to banks in the form of legal regulations; and the bank provides primary assistance in the form of credit restructuring for debtors who are deemed to be able to recover with the assistance provided, or provide relief in fulfilling their obligations. Apart from that, there is also assistance provided in the form of rescheduling and credit reconditioning. Meanwhile, proof is not needed if there is no party who denies it, because the Covid-19 pandemic is generally known.

Reference : 52 (1987-2023)

Keyword : Debtor, Legal Protection, Pandemic